PENGESAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA: TANTANGAN HUKUM DAN SOLUSINYA

Napoleon Bonaparte¹, L. Elly AM Pandiangan^{2*}, Nanin Koeswidi Astuti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: elly.pandiangan@uki.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Abstract: *This study examines the legal validity of marriages among indigenous belief followers in Indonesia and the efforts to secure state recognition for such marriages. In practice, these individuals often face difficulties in obtaining legal acknowledgment due to unclear regulations and limited public understanding. This research employs an empirical juridical method with a sociological and descriptive-analytical approach, combining field data from observations and interviews with primary and secondary legal materials. The findings indicate that indigenous belief marriages can be legitimized if conducted before a leader of the respective belief, in accordance with Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Government Regulation No. 40 of 2019. After receiving a marriage certificate, followers of indigenous beliefs can register at the civil registry office to obtain an official marriage certificate.*

Keywords: *Marriage recognition; Cell Phone Access Without Permission; Indigenous beliefs.*

How to Site: Napoleon Bonaparte, L. Elly AM Pandiangan, Nanin Koeswidi Astuti (2025). Pengesahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Tantangan Hukum dan Solusinya. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 79-105. DOI. 10.55809/tora.v11i1.403

Introduction

Saat ini, pernikahan antar-penghayat kepercayaan masih menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Masalah utamanya adalah bahwa keyakinan mereka belum diakui dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun mereka adalah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Status mereka sebagai penghayat kepercayaan, membuat pernikahan mereka tidak diakui oleh negara, sehingga pasangan antar penghayat kepercayaan ini kesulitan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS).

Proses birokrasi yang kompleks dan terbatasnya penerimaan dari beberapa kantor catatan sipil membuat para penghayat sering kali mengeluhkan ketidakmampuan untuk mencatatkan status pernikahan mereka. Ketiadaan pengakuan ini berdampak signifikan terhadap status hukum pernikahan penghayat kepercayaan, termasuk kepastian hukum bagi istri dan anak di masa depan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), keberadaan penghayat kepercayaan bahkan dianggap tidak ada di Indonesia. Penganut ajaran ketuhanan dari budaya lokal seringkali dipaksa untuk memilih salah satu dari enam agama resmi yang diakui negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PNPS. Permasalahan ini sebetulnya berkaitan dengan interpretasi konsep "agama dan kepercayaan" dalam Undang-Undang Perkawinan. Perdebatan apakah pemerintah boleh menerima pencatatan perkawinan penghayat sebenarnya mencerminkan persoalan mendasar seputar tafsir agama dan kepercayaan dalam regulasi hukum. Meskipun terlihat sederhana, kekeliruan dalam penafsiran ini dapat berdampak fatal terhadap hak-hak warga negara.

Pancasila, sebagai dasar negara, menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, yang menggarisbawahi pentingnya menghormati keyakinan setiap warga negara. Dasar negara ini menekankan bahwa keberagaman keyakinan, termasuk penghayat kepercayaan, adalah bagian penting dari Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Di luar keenam agama ini, bentuk-bentuk kepercayaan lain yang berkembang di masyarakat dikategorikan sebagai "organisasi kepercayaan." Keberadaan agama-agama ini di Indonesia bukanlah hal baru; mereka hadir melalui sejarah panjang interaksi budaya dan agama dari berbagai wilayah dan era. Dalam prosesnya, agama-agama ini berbaur dengan kepercayaan asli yang telah dianut masyarakat Indonesia sejak lama, seperti animisme dan dinamisme, yang menghormati kekuatan roh dan alam.¹

Perpaduan ini, yang dikenal sebagai "sinkretisme," memungkinkan ajaran agama baru untuk diterima tanpa sepenuhnya menghilangkan kepercayaan lokal. Melalui sinkretisme, masyarakat memadukan nilai dan tradisi baru dengan kepercayaan lama, sehingga menciptakan praktik keagamaan unik yang mencerminkan identitas lokal mereka. Fenomena ini tampak jelas dalam berbagai komunitas yang mempertahankan tradisi leluhur, yang sering kali mencampurkan unsur-unsur dari berbagai ajaran agama. Sinkretisme ini menjadi salah satu ciri khas kehidupan keagamaan di Indonesia, mencerminkan keragaman keyakinan yang ada di tengah masyarakat.

Organisasi Kepercayaan di Indonesia adalah bentuk keyakinan terhadap Tuhan yang berasal dari ajaran budaya lokal dan tradisi masyarakat adat Indonesia. Keyakinan ini berkembang dari kebiasaan, nilai, dan kearifan lokal yang telah dijalankan secara turun-temurun oleh berbagai kelompok masyarakat di Nusantara.² Pada dasarnya, ketika

¹ Ekadjali, E.S., et.al., Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Barat, Bandung: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979, hlm. 30.

² Andrianih, A., Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama pada Dokumen Kependudukan, Jurnal Rechtvinding, 2009, hlm.1.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk, negara ini terbentuk dari persatuan berbagai komunitas adat yang memiliki kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional yang kuat.

Organisasi-organisasi ini, yang juga dikenal sebagai Organisasi Kepercayaan dan Kebatinan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewakili beragam bentuk kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama resmi oleh negara, namun tetap memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual banyak orang Indonesia. Kepercayaan-kepercayaan ini menggambarkan penghormatan terhadap kekuatan alam, roh leluhur, dan konsep Ketuhanan sesuai dengan pandangan komunitas lokal. Keberadaan organisasi kepercayaan ini menunjukkan betapa beragamnya cara masyarakat Indonesia dalam memahami dan menghayati nilai-nilai Ketuhanan.

Organisasi kepercayaan di Indonesia berakar pada ajaran lokal budaya yang berkembang di berbagai daerah, baik secara murni maupun melalui proses akulturasi dengan agama-agama resmi yang ada. Menurut Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat, kepercayaan atau kebatinan merupakan hasil dari pemikiran dan refleksi manusia untuk memahami hal-hal yang bersifat gaib dan mengarahkan kehidupannya menuju kesempurnaan. Organisasi kepercayaan ini memiliki ritual-ritual tertentu yang dirancang untuk membantu para penganutnya dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam, mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai konsep mereka, dan mencapai budi luhur serta kesempurnaan hidup.³

Di Indonesia, organisasi kepercayaan telah menjadi bagian integral dari keragaman budaya yang kaya. Beberapa contohnya termasuk agama Buhun di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Parmalim di kalangan masyarakat Batak, dan Kaharingan di Kalimantan. Penghayat kepercayaan ini sebelumnya sering disebut sebagai "Kebatinan" atau "organisasi kepercayaan."

Organisasi-organisasi ini tetap eksis dengan banyak pengikut setia, mencerminkan keyakinan yang sudah turun-temurun dan cara hidup yang menghargai kekuatan alam, leluhur, dan entitas spiritual. Mereka merupakan wujud dari keberagaman spiritual di Indonesia, yang mengedepankan nilai-nilai keselarasan dengan alam dan kehidupan. Pada tahun 1953, Departemen Agama mencatat bahwa terdapat sekitar 360 organisasi kepercayaan dan kebatinan di Indonesia. Pada masa itu, agama-agama besar yang datang ke Indonesia mulai berkembang pesat dan akhirnya diakui sebagai agama resmi,

³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

sedangkan kepercayaan lokal dianggap lebih sebagai bagian dari budaya bangsa, bukan sebagai agama resmi.⁴

Saat ini di Indonesia terdapat setidaknya ada 187 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Sedikitnya dari jumlah organisasi penghayat yang ada di Indonesia, ada 12 juta orang di Indonesia yang merupakan penghayat kepercayaan. Hal ini berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Pada saat ini belum ada perubahan data baru mengenai jumlah organisasi penghayat kepercayaan maupun penghayat kepercayaan. Rencananya pembaharuan data tersebut akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap berkurang atau bertambahnya jumlah dari organisasi penghayat kepercayaan maupun penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.⁵

IGN Nurdjana, dalam bukunya *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, mengklasifikasikan Penghayat Kepercayaan menjadi empat kelompok utama, yaitu:

(1) Agama Lokal yang Berbaur dengan Budaya Setempat: Kepercayaan ini merupakan perpaduan antara keyakinan tradisional dan budaya lokal. Contohnya adalah kepercayaan masyarakat Suku Manyaan di Kalimantan Tengah, Suku Dayak Kaharingan, Sunda Wiwitan di Kanekes Banten, Djawa Sunda di Kuningan Jawa Barat, Suku Tolotang di Sulawesi Selatan, Suku Badui, dan Suku Marapu di Sumba. Kepercayaan ini menyelaraskan keyakinan pada kekuatan alam dan leluhur dengan kehidupan sehari-hari komunitas.

(2) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Bentuk Kebatinan: Kelompok ini adalah bentuk kepercayaan yang lebih berfokus pada meditasi, pengembangan spiritual, dan hubungan batiniah dengan Tuhan. Contoh kepercayaan kebatinan di Jawa termasuk Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Darma, dan Budi Luhur. Praktik-praktik ini cenderung mengajarkan penghayatan batin dan keselarasan dengan nilai-nilai Ketuhanan.

(3) Kepercayaan yang Mirip dengan Agama atau Berindikasi Agama: Kelompok ini mencakup sekte-sekte keagamaan, organisasi keagamaan, dan jemaah yang memiliki kesamaan dengan ajaran agama formal. Contohnya termasuk Ahmadiyah dan Buda Jawi

⁴ Wijayanti, W. *Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 5.

⁵ Wawancara yang dilakukan bersama Suharti dan Merry Brilianty (Pamong Budaya Ahli Madya dan Pamong Budaya Ahli Muda) narasumber dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Wisnu. Meski tidak diakui sebagai agama resmi, kelompok ini tetap menjalankan keyakinan spiritual tertentu yang mirip dengan praktik agama formal.

(4) Klenik atau Kepercayaan Mistik: Kelompok ini mencakup praktik-praktik supranatural atau mistis seperti paranormal, dukun, pengobatan tradisional, dan santet. Kepercayaan ini lebih berorientasi pada kemampuan dan kekuatan gaib yang diyakini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti penyembuhan atau perlindungan.⁶

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan di Indonesia sangat beragam, dan tidak semua bentuk kepercayaan mendapat pengakuan resmi sebagai agama. Meski demikian, keberagaman ini tetap mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan antar penghayat kepercayaan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk diakui oleh negara. Kesulitan ini berakar pada undang-undang perkawinan yang hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia, sehingga keyakinan para penghayat kepercayaan, yakni keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bersumber dari ajaran budaya local, tidak termasuk di dalamnya. Akibatnya, pernikahan yang dilangsungkan oleh para penghayat kepercayaan sering kali tidak diakui secara hukum.⁷ Oleh karenanya untuk memperoleh pengakuan, pasangan penghayat kepercayaan berupaya mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS).

Namun, proses birokrasi sering kali menghalangi upaya ini, karena belum semua kantor catatan sipil menerima pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Banyak pengikut kepercayaan lokal yang mengeluh tentang penolakan pendaftaran pernikahan mereka, yang mengakibatkan status hukum mereka dan keluarganya menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada status hukum istri dan anak mereka di masa depan, yang dapat mempengaruhi hak-hak hukum seperti warisan, identitas, dan hak sipil lainnya.

Sebelum adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), penghayat kepercayaan bahkan dianggap tidak ada secara resmi di Indonesia. Mereka sering dipaksa untuk memilih salah satu dari enam agama resmi yang diakui negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PNPS. Masalah pencatatan pernikahan ini sesungguhnya merupakan isu sederhana tetapi berakar pada penafsiran undang-

⁶ Nurdjana, IGN ., *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 53.

⁷ Shaleh Harun, H.M., *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, Yogyakarta: Aquarius, 1984, hlm. 79.

undang terkait agama dan kepercayaan. Jika penafsiran ini tidak tepat, dampaknya bisa sangat besar dan merugikan.

Penelitian Ranti, Ilham Abbas, dan Abdul Halim mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membahas mengenai status hukum perkawinan penghayat kepercayaan jika dilihat dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk mengetahui serta menganalisis kedudukan anak yang lahir dari dari perkawinan penghayat kepercayaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan oleh para penghayat kepercayaan kini dapat dianggap sah oleh negara, asalkan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007, banyak perkawinan penghayat kepercayaan belum tercatat secara resmi. Oleh karena itu, PP No. 37 Tahun 2007 memberikan kesempatan kepada pasangan yang telah menikah sebelum peraturan ini untuk mencatatkan pernikahan mereka hingga batas waktu tahun 2009. Proses pencatatan ini membutuhkan beberapa dokumen penting, yaitu surat perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan, fotokopi KTP, pas foto suami dan istri, serta paspor jika salah satu pasangan adalah warga negara asing. Peraturan ini juga memberikan status hukum yang lebih jelas bagi anak-anak dari pasangan penghayat kepercayaan.

Menurut PP No. 37 Tahun 2007, anak-anak yang lahir dari perkawinan ini secara sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, sama seperti anak-anak dari pernikahan lain yang tercatat. Mereka juga berhak memiliki akta kelahiran dan akses ke berbagai dokumen administratif lain yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial pada umumnya.⁸

Penelitian Maulida Qorry Ainaya mengenai perkawinan dan perceraian penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PUU-XIV/2026, membahas mengenai perbedaan perkawinan penghayat kepercayaan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan implikasi pencatatan perkawinan terhadap perceraian penghayat kepercayaan dilihat dari kekuasaan kewenangan yudikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 membawa perubahan signifikan dalam pengakuan dan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia.

⁸ Ranti, Abbas, I., Halim, A., (2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1, Agustus 2020, hlm. 1-40.

Sebelumnya, pasangan penghayat kepercayaan dihadapkan pada kesulitan untuk mendapatkan legalitas perkawinan sesuai keyakinan mereka, karena harus mengaku sebagai penganut salah satu agama yang diakui negara demi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil. Hal ini menimbulkan keterpaksaan pengakuan yang tidak sesuai dengan identitas asli mereka. Setelah putusan ini, penghayat kepercayaan dapat mencantumkan keyakinan mereka di kolom agama dalam KTP dan Kartu Keluarga, dan perkawinan mereka dicatatkan secara sah tanpa harus berpura-pura menjadi penganut agama lain.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 mengatur prosedur pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sekaligus memperjelas status hukum bagi anak dan hak-hak sipil mereka. Jika pasangan penghayat bercerai, meskipun pernah tercatat di KUA sebagai pemeluk agama Islam, urusan perceraian ditangani Pengadilan Negeri, sesuai dengan prinsip personalitas hukum non-Islam. Dengan ini, penghayat kepercayaan memperoleh hak yang setara dalam administrasi kependudukan dan kepastian hukum atas status keluarga mereka.⁹

Penelitian Lutfiyanti Andromeda mengenai Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman), membahas mengenai pola perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya; model perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya dan praktek perkawinan sesuai Undang-undang Pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghayat kepercayaan Sapta Darma diakui secara hukum dalam pernikahan mereka melalui pola elutrogami, yaitu pernikahan yang dapat melintasi suku atau etnis, asalkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan keyakinan Sapta Darma. Hanya anggota resmi Sapta Darma yang bisa menikah dalam prosesi ini, dibuktikan dengan kartu anggota. Dengan pengakuan pemerintah, tata cara pernikahan Sapta Darma mengikuti aturan negara, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2013 yang memperjelas prosedur administrasi bagi para penghayat kepercayaan.

Di Surabaya, prosesi pernikahan Sapta Darma telah memenuhi semua syarat pemerintah, termasuk pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), yang mengeluarkan akta pernikahan setelah tata cara adat selesai. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan pencatatan nikah efektif dan memudahkan penghayat

⁹ Ainaya, M.Q., Perkawinan dan perceraian penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PUU-XIV/2026, skripsi yang tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

kepercayaan, yang kini memiliki akses mudah untuk mendapatkan hak dan kepastian hukum dalam perkawinan mereka.¹⁰

Oleh karena itu artikel ini bermaksud ingin membahas permasalahan yang dihadapi oleh penganut penghayat kepercayaan di Indonesia adalah terkait keabsahan perkawinan mereka di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan penghayat kepercayaan agar perkawinannya mendapatkan pengesahan dari negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan bahan hukum primer dengan data lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang subjek penelitian. Metode yuridis empiris ini memanfaatkan pendekatan sosiologis, yang berarti analisis hukum tidak hanya berfokus pada norma dan aturan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial di mana hukum diterapkan.¹¹ Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan sistematis terhadap fenomena hukum tertentu serta implikasinya dalam masyarakat.

Data yang dikumpulkan mencakup data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait, memberikan pandangan yang aktual dan relevan. Selain itu, data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber pustaka, seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teori yang kokoh. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman holistik mengenai masalah hukum yang diteliti, mencakup aspek normatif dan empiris secara menyeluruh.¹²

¹⁰ Andromeda, L., *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)*, Tesis yang tidak diterbitkan, Program Studi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm.43.

¹² Fajar, M. dan Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.192.

Discussion

Syarat Sah Perkawinan

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, ada ketentuan atau syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin agar perkawinan tersebut sah secara hukum. Syarat-syarat ini terbagi menjadi dua jenis: syarat materiil umum (absolut) dan syarat materiil khusus (relatif). Syarat materiil umum atau syarat absolut berlaku untuk semua perkawinan tanpa pengecualian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pasangan calon mempelai tidak berwenang secara mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini menciptakan hambatan absolut atau larangan yang tidak bisa dinegosiasikan, sehingga ketidakpenuhan syarat ini menyebabkan pernikahan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Syarat materiil khusus atau syarat relatif hanya berlaku untuk situasi-situasi tertentu dalam perkawinan. Ketidakpenuhan syarat ini tidak menyebabkan larangan mutlak, tetapi menciptakan ketidakwenangan khusus yang tergantung pada konteks tertentu. Hal ini berarti syarat materiil khusus dapat memberikan batasan atau penghalang dalam situasi spesifik yang bisa menunda atau menghalangi perkawinan di antara individu-individu tertentu. Dengan kata lain, syarat-syarat ini memastikan bahwa perkawinan dijalankan sesuai aturan yang berlaku, baik secara universal maupun dalam konteks spesifik tertentu, sehingga setiap perkawinan memiliki landasan yang sah dan sesuai hukum.¹³

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas yang harus dipenuhi saat melangsungkan perkawinan, yang mengatur prosedur dan tahapan administrasi. Dalam konteks perkawinan, syarat formil berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh calon mempelai pada saat pelaksanaan perkawinan.

Syarat materiil umum yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan mencakup beberapa hal penting, yaitu:

- (1) Persetujuan bebas: Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara bebas dan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 28 KUHP. Persetujuan ini menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan dengan kehendak bersama dari kedua belah pihak;

¹³ Darmabrata, W., 2009, Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan, Jilid 1, Jakarta: Rizkita, hlm.63-64.

(2) Usia yang cukup: Undang-undang menetapkan batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pria, usia minimal adalah 19 tahun, sementara bagi wanita, usia minimal adalah 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sementara itu, menurut KUHPer, usia yang cukup untuk perkawinan adalah 18 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita (Pasal 29 KUHPer);

(3) Tidak terikat perkawinan sebelumnya: Kedua belah pihak harus bebas dari perkawinan yang sebelumnya, kecuali yang diperbolehkan oleh undang-undang, seperti dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini juga terkait dengan asas monogami dalam perkawinan, yang mengharuskan pasangan untuk tidak terikat dengan pernikahan lain (Pasal 27 KUHPer).

(4) Tenggang waktu tunggu: Bagi wanita yang telah bercerai dan ingin menikah lagi, terdapat tenggang waktu yang harus dipatuhi sebelum melakukan perkawinan berikutnya. Menurut undang-undang, wanita yang telah cerai wajib menunggu waktu tunggu yang diatur oleh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam KUHPer, jangka waktu tunggu ditetapkan selama 300 hari setelah perceraian sebelumnya (Pasal 34 KUHPer).¹⁴ Penting untuk dipahami bahwa syarat materil umum ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari segi usia, persetujuan, dan status hukum masing-masing pihak.

Tujuan Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur syarat-syarat perkawinan yakni: Pertama, syarat materil dan kedua syarat formil. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun diatur dalam perundang undangan. Sedangkan, syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) Tahun 1973, penentuan sahnya perkawinan ditegaskan melalui proses pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 2 dalam RUU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat administratif dan hukum. Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan: Perkawinan harus dilakukan dengan melibatkan pejabat yang berwenang, yakni pegawai pencatatan

¹⁴ Ibid.

perkawinan yang ditunjuk untuk menyaksikan dan mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut;

(2) Dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan: Setelah upacara perkawinan dilaksanakan, pegawai pencatatan perkawinan wajib mencatatkan perkawinan tersebut dalam daftar resmi yang diatur oleh hukum, yang menjadi bukti sahnya perkawinan di mata negara;

(3) Dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku: Selain ketentuan dalam undang-undang perkawinan, perkawinan juga harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat, selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Perkawinan.¹⁵

Dengan demikian, sahnya sebuah perkawinan menurut RUUP 1973 tidak hanya bergantung pada pelaksanaan pernikahan itu sendiri, tetapi juga pada pemenuhan prosedur administratif yang mencakup pencatatan di daftar pencatatan perkawinan, yang menjamin validitas dan keberlakuan perkawinan tersebut menurut hukum negara. Proses ini menegaskan pentingnya peran pencatatan dalam mewujudkan pengakuan sah secara hukum terhadap suatu perkawinan.

Secara yuridis, fungsi pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan. Pencatatan ini merupakan syarat agar perkawinan mendapatkan kepastian hukum dari negara dan memiliki dampak hukum yang mengikat pihak ketiga. Tanpa pencatatan yang sah, perkawinan tidak diakui secara resmi oleh negara, yang dapat berpengaruh pada hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri, seperti hak waris, hak anak, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status pernikahan.

Pencatatan perkawinan juga mencerminkan pentingnya kepastian hukum, di mana suatu peristiwa perkawinan yang sah harus dibuktikan dengan akta perkawinan yang tercatat dalam daftar pencatatan perkawinan. Dengan demikian, mekanisme pencatatan yang jelas dan teratur sangat penting untuk memastikan bahwa suatu perkawinan tidak hanya sah menurut adat atau agama, tetapi juga diakui secara legal oleh negara.

¹⁵ Djubaidah, N., Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 207.

Para ahli hukum juga sepakat bahwa pencatatan perkawinan adalah persyaratan formal yang harus dipenuhi agar perkawinan diakui sah secara hukum. Artinya, konstruksi legalitas perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum adalah yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti kantor catatan sipil atau kantor urusan agama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat penguat keabsahan hukum suatu perkawinan dalam sistem hukum negara.¹⁶

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur secara rinci tentang mekanisme pencatatan perkawinan.¹⁷ Pasal 2 PP ini mengatur tentang prosedur pencatatan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan yang menikah. Pada ayat (1), disebutkan bahwa pencatatan perkawinan untuk pasangan yang menikah menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Hal ini mencerminkan bahwa bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan agama Islam, proses pencatatan dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, yang melibatkan kantor urusan agama (KUA) sebagai instansi yang berwenang.

Sementara itu, untuk pasangan yang menikah berdasarkan agama atau kepercayaan selain Islam, ayat (2) mengatur bahwa pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil, yang sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatatan perkawinan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan prosedur pencatatan tergantung pada agama atau kepercayaan pasangan yang bersangkutan.

Pada ayat (3), peraturan ini menyebutkan bahwa meskipun ada ketentuan khusus yang berlaku untuk pencatatan perkawinan berdasarkan agama atau kepercayaan, tata cara pencatatan perkawinan itu sendiri tetap mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975. Ini menegaskan pentingnya kejelasan prosedural dan administratif dalam proses pencatatan perkawinan, baik bagi pasangan yang beragama Islam maupun yang beragama atau mempercayai kepercayaan lainnya, agar perkawinan tersebut diakui sah secara hukum oleh negara.¹⁸

¹⁶ Liky Faizal, 2018, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Kebudayaan Islam 8, no. 2, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>

¹⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050.

¹⁸ Ibid.

Tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum mengenai status pernikahan yang dilakukan. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkawinan, yaitu suami dan istri. Dalam konteks hukum, setiap individu yang menikah memiliki kewajiban yang saling mengikat dan hak yang harus dihormati oleh kedua belah pihak.¹⁹

Jika salah satu pihak dalam perkawinan gagal memenuhi kewajibannya, pencatatan perkawinan menjadi kunci untuk memberikan perlindungan hukum. Tanpa adanya pencatatan yang sah, salah satu pihak tidak dapat menuntut hak atau melakukan upaya hukum karena tidak adanya alat bukti autentik yang dapat membuktikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar terjadi. Akta perkawinan atau buku nikah berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung klaim-klaim hukum yang terkait dengan hak-hak pasangan dalam pernikahan.

Dengan pencatatan yang resmi, pasangan yang menikah dapat mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka, baik terkait dengan harta benda, hak waris, maupun hak atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari sistem hukum negara yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pengaturan Aliran Kepercayaan di Indonesia

Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara khusus mengakui aliran kepercayaan sebagai agama resmi. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 hanya mengakui enam agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Aliran kepercayaan, yang telah ada sejak lama di Indonesia, tidak termasuk dalam enam agama yang diakui tersebut. Meskipun demikian, Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, yang mencakup kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Aliran kepercayaan ini baru populer pasca-Reformasi, sering kali disamakan dengan agama lokal atau nusantara, dan banyak diidentifikasi dengan kearifan lokal.

Penganut aliran kepercayaan tersebar di berbagai daerah dan terdaftar di beberapa lembaga negara, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta berada di bawah pengawasan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran

¹⁹ Rahman, B.A., dan Sukardja, A., *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981, hlm. 38.

Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Saat ini, terdapat sekitar 187 organisasi aliran kepercayaan tingkat pusat dan lebih dari 1.000 cabang daerah.²⁰

Pada tahun 1973, TAP MPR mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa agama dan kepercayaan adalah ekspresi yang sah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan keduanya memiliki kedudukan yang setara. Namun, pada tahun 1978, TAP MPR No. 4 menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama, melainkan bagian dari kebudayaan, yang mengarah pada kewajiban pengisian kolom agama di KTP dengan salah satu dari lima agama yang diakui negara (sekarang enam agama). Hal ini menyebabkan diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan, karena mereka tidak bisa mengisi kolom agama sesuai dengan keyakinan mereka, yang menghambat akses mereka terhadap perlindungan hukum dari pemerintah.

Pada tahun 2006, meskipun UU Administrasi Kependudukan mengalami revisi, pasal 61 dan 64 UU No. 23 Tahun 2006 masih mendiskriminasi penganut aliran kepercayaan dengan membiarkan kolom agama kosong, meskipun mereka tetap mendapatkan pelayanan administrasi yang setara. Diskriminasi ini memperlihatkan kesulitan bagi penganut aliran kepercayaan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara dengan pemeluk agama yang diakui negara.

Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, khususnya Pasal 61 dan 64, yang mengatur tentang kewajiban pencantuman kolom agama dalam dokumen identitas. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945, yang seharusnya memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih agama atau kepercayaan yang dianut tanpa diskriminasi. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pencantuman kolom agama yang hanya terbatas pada enam agama yang diakui negara, mengabaikan keberadaan aliran kepercayaan yang telah ada sejak lama di Indonesia.

Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi penganut aliran kepercayaan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan penganut agama-agama yang telah diakui negara. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam memberikan pengakuan hukum terhadap keberagaman kepercayaan di Indonesia, serta menjamin hak konstitusional para penganut aliran kepercayaan untuk diakui secara sah dalam dokumen identitas resmi, tanpa harus memaksakan diri untuk mengidentifikasi sebagai pemeluk agama yang diakui negara.

²⁰ Maarif, S., *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*, Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya 2017, hlm. 5.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU XIV/2016 (Putusan MK 97/2016) merupakan tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada penghayat kepercayaan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan menegaskan tiga pilar utama jaminan konstitusional terhadap penghayat kepercayaan, yaitu:

(1) Penafsiran Pasal 29 UUD 1945: Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan konstitusi, karena tidak memasukkan "kepercayaan" sebagai bagian dari agama. MK menggunakan penafsiran original intent dari Pasal 29 UUD 1945 untuk menegaskan bahwa istilah "kepercayaan" adalah bagian yang tidak terpisahkan dari "agama" dalam konstitusi;

(2) Hak Konstitusional atas Kepercayaan: Putusan MK ini menegaskan bahwa hak atas agama, termasuk kepercayaan, adalah hak konstitusional yang bersifat natural rights atau hak alamiah setiap individu, yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun dan

(3) Kepastian Hukum dan Persamaan di Depan Hukum: MK juga menilai bahwa pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik menimbulkan ketidakjelasan status hukum mereka dalam administrasi kependudukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum, serta bersifat diskriminatif.²¹

Putusan ini memberi ruang bagi penganut aliran kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan hukum yang setara dengan pemeluk agama-agama yang diakui negara, serta melindungi mereka dari diskriminasi administratif.

Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menguji kesesuaian peraturan tersebut dengan UUD 1945. Putusan ini menegaskan penyetaraan antara agama dan kepercayaan dalam konteks administrasi kependudukan, terutama terkait pencatatan identitas keagamaan dalam dokumen resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

²¹ Mehulika Sitepu, 2018, Usulan MIU terkait kepercayaan: Patutkah ada dua jenis KTP?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia42720435>

Inti dari putusan ini adalah pengakuan terhadap penghayat kepercayaan dengan mencantumkan kolom "kepercayaan" pada KTP, yang sebelumnya hanya mencantumkan agama-agama resmi. Dengan adanya pencantuman kepercayaan, penghayat aliran kepercayaan tidak lagi mengalami diskriminasi dalam proses administrasi kependudukan, mempermudah mereka dalam mengurus berbagai urusan administratif.

Putusan ini juga menyelaraskan prinsip perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Penjelasan dari Pasal 1 tersebut menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga terkait erat dengan agama dan kerohanian, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, keabsahan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan kini diakui secara sah oleh hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang berarti bahwa aturan khusus, dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah tanpa diskriminasi, yang berarti hak tersebut berlaku untuk semua, termasuk bagi Penghayat Kepercayaan.

Dengan adanya putusan MK tersebut, kedudukan hukum Penghayat Kepercayaan setara dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Mereka kini dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan tanpa adanya diskriminasi. Penghayat Kepercayaan yang aliran kepercayaannya diakui dalam putusan tersebut, wajib mengikuti ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

Beberapa dasar hukum yang berlaku untuk perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah: (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan sah apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974; (2) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974); (3) Pada dasarnya, perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah perkawinan monogami, di mana seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dan jika dalam komunitas adat atau kelompok Penghayat Kepercayaan tersebut memperbolehkan, maka perkawinan poligami bisa saja diterima, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di komunitas tersebut.

Dengan demikian, Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 memberi kepastian hukum bagi Penghayat Kepercayaan untuk melaksanakan perkawinan yang sah dan diakui, serta mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti agama-agama lainnya.

Makna "agama" dalam syarat keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan kini harus disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini menyatakan bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak mencakup "kepercayaan." Ini berarti, dalam konteks hukum, istilah "agama" tidak terbatas hanya pada agama-agama yang resmi diakui oleh negara, tetapi juga mencakup penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini oleh Penghayat Kepercayaan.

Dalam Putusan MK tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran inklusif terhadap kata "agama," mengakui bahwa kepercayaan yang dipegang oleh individu atau kelompok, selain agama-agama yang terdaftar secara resmi, juga harus dihormati dan diberi perlindungan hukum. Hal ini merupakan langkah penting dalam mengakui keberagaman keyakinan dan kepercayaan di Indonesia, serta menegakkan prinsip keadilan bagi semua warga negara, termasuk Penghayat Kepercayaan.

Syarat sahnya perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, yang semula sering diabaikan atau dipersulit, diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini mengatur bahwa perkawinan adat yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan dianggap sah di mata hukum jika dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan mereka di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. Selanjutnya, perkawinan tersebut wajib didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pejabat di Kantor Catatan Sipil pun diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan ini sebagai perkawinan yang sah, sama halnya dengan perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama resmi.

Dengan demikian, Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 menjadi tonggak penting bagi perjuangan Penghayat Kepercayaan, karena melalui putusan ini mereka mendapatkan kedudukan yang setara dengan penganut agama resmi di Indonesia dalam hal pengakuan hukum dan perlindungan. Kini, Penghayat Kepercayaan dapat melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat secara sah di negara, memperoleh hak yang sama dalam berbagai urusan administratif dan hukum tanpa ada diskriminasi berdasarkan keyakinan mereka.

Keabsahan perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditetapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 membawa dampak hukum yang sangat signifikan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk suami istri dan anak-anak yang lahir

dari perkawinan tersebut. Putusan ini tidak hanya berfokus pada perubahan definisi "agama" dalam undang-undang, tetapi juga memperbaiki dan menyempurnakan sistem administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya dalam hal pendataan bagi Penghayat Kepercayaan.

Akibat hukum dari pengakuan perkawinan Penghayat Kepercayaan pasca Putusan MK sangat besar dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Penghayat Kepercayaan. Putusan tersebut memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan, yang sebelumnya sering tidak mendapatkan pengakuan hukum, kini diakui sah dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama resmi di Indonesia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, termasuk anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, yang sebelumnya mungkin mengalami kesulitan dalam hal administrasi kependudukan dan hak-hak hukum lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya meluaskan pengertian "agama" dalam konteks perundang-undangan, tetapi juga memberikan pembenahan yang penting pada sistem administrasi kependudukan di Indonesia, terutama dalam hal pendataan Penghayat Kepercayaan. Sebelumnya, Penghayat Kepercayaan sering kali diabaikan atau diperlakukan berbeda dalam hal administrasi kependudukan, seperti pencatatan status agama dalam KTP dan dokumen resmi lainnya. Namun, dengan adanya keputusan MK, status kepercayaan mereka kini diakui dan dihormati dalam sistem administrasi negara.

Lebih dari itu, Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 juga merupakan upaya konkret negara untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara, tanpa terkecuali. Negara kini dihadapkan pada kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu, baik yang memeluk agama resmi maupun Penghayat Kepercayaan, mendapat hak yang sama di depan hukum. Dengan demikian, Putusan MK ini bukan hanya soal memperluas makna agama dalam undang-undang, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menghilangkan diskriminasi berbasis perbedaan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sebelumnya mengarah pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi Penghayat Kepercayaan.

Dengan adanya putusan ini, masyarakat Penghayat Kepercayaan kini dapat menikmati hak-hak yang setara, termasuk hak atas perkawinan yang sah, perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka, dan akses yang lebih mudah dalam urusan administratif tanpa ada lagi diskriminasi atas dasar keyakinan mereka. Ini adalah kemajuan besar dalam mewujudkan negara yang lebih adil dan menghormati keberagaman keyakinan.

Upaya yang dilakukan penghayat kepercayaan untuk mendapat pengesahan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endang Retno Lastani, S.Sos., Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, yang juga merupakan pengurus dari berbagai organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia, beliau menjelaskan mengenai proses perkawinan di kalangan penghayat kepercayaan. Ibu Endang menyatakan bahwa dalam tradisi penghayat kepercayaan, seseorang yang ingin menikah biasanya akan dinikahkan oleh pemuka adat atau sesepuh dari organisasi kepercayaan masing-masing. Dalam beberapa organisasi, orang tua juga bisa menikahkan anaknya jika ingin melangsungkan perkawinan.

Namun, seiring dengan adanya regulasi yang mengatur perkawinan penghayat kepercayaan, yaitu Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019, perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan harus dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang terdaftar. Artinya, pemuka adat atau pemuka penghayat kepercayaan yang menikahkan pasangan tersebut harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan diakui sebagai pemuka penghayat kepercayaan yang sah dari organisasi yang bersangkutan.

Peraturan ini memberikan kejelasan hukum tentang siapa yang berhak melakukan pencatatan dan pemberkatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Keberadaan pemuka penghayat kepercayaan yang memiliki SKT ini menjadi syarat penting agar perkawinan tersebut sah di mata hukum. Dengan adanya pengakuan terhadap pemuka penghayat kepercayaan yang terdaftar, proses perkawinan penghayat kepercayaan kini diatur secara lebih formal dan terjamin legalitasnya, memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam komunitas penghayat kepercayaan.

Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan upaya negara untuk memberikan pengakuan terhadap keberagaman kepercayaan di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang mengikuti tradisi perkawinan dalam organisasi penghayat kepercayaan.

Proses perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia pada dasarnya mengikuti prosedur yang mirip dengan perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama-agama yang diakui, yaitu dengan kehadiran wali dan saksi. Wali, yang bisa berasal dari keluarga atau pemuka adat, memiliki peran penting dalam menyelenggarakan perkawinan, sedangkan saksi juga diperlukan untuk memastikan keabsahan perkawinan tersebut.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa situasi yang memungkinkan fleksibilitas dalam hal peran saksi.²² Jika organisasi penghayat kepercayaan belum mendaftarkan pemuka mereka atau jika organisasi tersebut tidak memiliki pemuka yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai pemuka penghayat kepercayaan, maka pemuka dari organisasi penghayat kepercayaan lain yang terdaftar dapat berfungsi sebagai saksi dalam perkawinan tersebut.

Hal ini menjadi penting mengingat beberapa organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia masih dalam proses pendaftaran anggota atau pemuka mereka, atau mereka menghadapi keterbatasan anggota yang tersebar di berbagai wilayah yang sulit dijangkau. Dalam keadaan seperti ini, pemuka dari kepercayaan lain yang sudah terdaftar dan memiliki SKT dapat diundang untuk menjadi saksi dalam proses perkawinan, meskipun mereka berasal dari organisasi yang berbeda.

Keberadaan aturan ini memberikan kelonggaran dan memungkinkan terjadinya pelaksanaan perkawinan yang sah, meskipun dalam kondisi di mana tidak semua organisasi penghayat kepercayaan memiliki pemuka yang terdaftar secara resmi. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam organisasi penghayat kepercayaan, sistem ini tetap menjamin adanya keabsahan dan perlindungan hukum bagi para penghayat kepercayaan yang melangsungkan perkawinan, serta mempermudah proses administrasi yang diperlukan.

Proses pengesahan perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia memiliki prosedur yang sesuai dengan tata cara masing-masing kepercayaan, namun tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengesahan perkawinan bagi penghayat kepercayaan:²³

a. Pengesahan oleh Orangtua atau Pemuka Adat

Yang pertama dan paling berhak untuk mengesahkan perkawinan adalah orangtua dari salah satu calon pengantin. Orangtua memiliki peran penting dalam memberikan izin dan pengesahan, sebagai bentuk restu dan pengakuan terhadap perkawinan tersebut. Namun, jika orangtua tidak dapat hadir atau memutuskan untuk memberikan kuasa, mereka dapat menyerahkan tugas pengesahan ini kepada sesepuh, ketua adat, atau pemuka penghayat kepercayaan yang terlibat dalam upacara perkawinan. Hal ini

²² Wawancara dengan Endang Retno Lastani S.Sos., Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, pada 26 Juni 2024.

²³ Ibid, wawancara dengan Ibu Endang Retno Lastani S.Sos., Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, pada 26 Juni 2024.

menunjukkan adanya fleksibilitas dan pengakuan terhadap peran adat dan kepercayaan dalam perkawinan, yang tidak terikat hanya pada lembaga agama tertentu.

b. Pengesahan Sesuai Tata Cara/Ritual Kepercayaan

Pengesahan perkawinan dilakukan melalui prosesi atau ritual yang sesuai dengan ajaran dan tradisi kepercayaan yang dipilih oleh pasangan pengantin. Proses ini dapat mencakup berbagai macam ritual yang menjadi ciri khas dari masing-masing penghayat kepercayaan, yang memberikan makna sakral pada perkawinan. Ritual ini memiliki nilai spiritual dan budaya yang penting, karena mencerminkan keyakinan pasangan pengantin dalam menjalani hidup bersama.

c. Penandatanganan Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Setelah prosesi ritual selesai, langkah berikutnya adalah penandatanganan Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan. Surat ini ditandatangani oleh pasangan pengantin, orangtua, saksi-saksi yang hadir, dan pemuka penghayat kepercayaan. Penandatanganan ini menjadi bukti sahnya perkawinan secara sosial dan keagamaan, serta sebagai langkah penting dalam pengakuan hukum terhadap hubungan tersebut.

d. Pencatatan di Kantor Pencatatan Sipil

Setelah proses pengesahan selesai, pasangan pengantin bersama dengan orangtua dan saksi-saksi wajib membawa Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan untuk didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil. Proses ini merupakan langkah administratif yang penting untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat dalam sistem kependudukan negara.

Dengan tercatatnya perkawinan di kantor pencatatan sipil, pasangan pengantin memperoleh pengakuan resmi dari negara, yang memberikan mereka hak-hak hukum sebagai pasangan sah, seperti hak waris, hak atas perlindungan hukum, dan akses administratif lainnya.

Melalui proses ini, penghayat kepercayaan dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum dan diakui oleh negara, meskipun mereka tidak terdaftar dalam agama-agama yang diakui secara formal di Indonesia. Proses ini mencerminkan langkah maju dalam pengakuan negara terhadap keberagaman keyakinan dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warganya.

Perkawinan bagi penghayat kepercayaan memiliki fleksibilitas lokasi dan pelaksanaan. Tidak ada batasan tempat khusus yang harus digunakan, sehingga pasangan dapat memilih lokasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini disebabkan karena belum ada aturan atau organisasi tertentu yang menentukan tempat khusus untuk melangsungkan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.²⁴

Selain itu, perkawinan antar-organisasi kepercayaan juga dapat dilakukan, karena pada dasarnya setiap organisasi penghayat tidak dipandang sebagai agama yang terpisah, melainkan sebagai bentuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memungkinkan adanya perkawinan antara individu yang berasal dari organisasi penghayat yang berbeda, karena inti dari keyakinan setiap organisasi penghayat kepercayaan adalah sama, yaitu kepercayaan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan di antara organisasi atau paguyuban penghayat hanya terletak pada cara atau ritual yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.²⁵

Dalam peristiwa perkawinan antar-organisasi penghayat kepercayaan, pasangan memiliki kebebasan untuk memilih tata cara ritual yang akan digunakan dalam proses perkawinan. Mereka dapat memilih apakah akan mengikuti tata cara dari salah satu organisasi atau menyepakati tata cara yang lain yang mereka anggap paling cocok. Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa masyarakat penghayat kepercayaan menganut nilai kebebasan dalam praktik ibadah dan pelaksanaan perkawinan, serta mengedepankan kesamaan dalam keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman tata cara ini dianggap sebagai bagian dari kekayaan spiritual yang mencerminkan keberagaman budaya dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, perkawinan dalam komunitas penghayat kepercayaan diakui dengan tetap menghormati prinsip dasar kebebasan beribadah dan memperkuat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus mengakui keragaman budaya yang ada di tengah-tengah mereka.

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan kini dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Putusan ini dihasilkan dari permohonan yang diajukan oleh berbagai perwakilan penghayat kepercayaan yang merasa hak-hak sipilnya kurang diakui dalam administrasi negara. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan tiga poin utama yang memperkuat posisi hukum penghayat kepercayaan.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Suharti dan Ibu Merry Brilianty, yang merupakan Pamong Budaya di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, pada 26 Juni 2024.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Endang Retno Lastani S.Sos., Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, pada 26 Juni 2024.

Pertama, penghayat kepercayaan dipandang sebagai bagian integral dari konsep "agama" dalam konteks administrasi kependudukan di Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, meskipun memiliki bentuk dan ritual yang berbeda dari agama-agama besar, tetap diakui sebagai ekspresi keagamaan yang sah. Kedua, hak-hak para penghayat kepercayaan dipandang sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum agar mereka dapat menjalankan kepercayaan mereka tanpa diskriminasi. Ketiga, pengisian kolom agama dalam KTP dan dokumen administrasi lainnya kini telah menjadi bagian dari kepastian hukum bagi penganut kepercayaan, mengakhiri ketidakjelasan status administratif yang selama ini mereka alami.

Putusan ini membawa dampak positif bagi kehidupan para penghayat kepercayaan di Indonesia. Mereka kini dapat mencatatkan perkawinan mereka secara resmi dan mendapatkan hak-hak administratif yang sama dengan penganut agama lainnya. Dengan demikian, para penghayat kepercayaan tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga diberdayakan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi langkah maju dalam menciptakan persamaan hak bagi seluruh warga negara, sekaligus menjamin penghayat kepercayaan tidak lagi mengalami diskriminasi administratif.

Conclusion

Keabsahan perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia kini diakui secara sah apabila dilangsungkan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019, yang mengatur pelaksanaan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Kepercayaan yang diakui negara memberikan hak kepada penganutnya untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi, setara dengan pencatatan yang dilakukan oleh penganut agama lainnya. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan penghayat kepercayaan diharuskan mengunjungi Kantor Catatan Sipil untuk meminta izin menikah sesuai kepercayaan mereka. Setelah memperoleh izin, perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pemuka adat dari organisasi penghayat kepercayaan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau, dalam beberapa kasus, oleh orang tua dari calon pengantin pria atau wanita.

Usai prosesi pernikahan, pemuka kepercayaan akan mengeluarkan surat perkawinan penghayat kepercayaan. Surat ini penting karena akan digunakan oleh pasangan untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Catatan Sipil, sehingga keduanya mendapatkan akta pernikahan yang sah. Dengan langkah ini, negara memastikan bahwa para penghayat kepercayaan dapat menikmati hak administratif dan perlindungan hukum yang sama dalam pernikahan mereka, mengakhiri berbagai ketidakpastian hukum yang sebelumnya mereka hadapi.

Reference

Books

- Darmabrata, W., 2009, Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan, Jilid 1, Jakarta: Rizkita.
- Djubaidah, N., Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ekadjali, E.S., et.al., Sejarah Kebangkitan Nasional Jawa Barat, Bandung: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979.
- Fajar, M. dan Achmad, Y. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Maarif, S., Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia, Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya 2017.
- Nurdjana, IGN ., Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rahman, B.A., dan Sukardja, A., Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW) , Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Ranti, Abbas, I., Halim, A., (2020), Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1, Agustus 2020.
- Shaleh Harun, H.M., Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal, Yogyakarta: Aquarius, 1984.
- Wijayanti, W. Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ainaya, M.Q., Perkawinan dan perceraian penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PUU-XIV/2026, skripsi yang tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Andromeda, L., Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman), Tesis yang tidak diterbitkan, Program Studi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Journal

Andrianih, A., Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama pada Dokumen Kependudukan, Jurnal Rechtvinding, 2009, hlm.1.

Liky Faizal, 2018, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Kebudayaan Islam 8, no. 2, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>

Mehulika Sitepu, 2018, Usulan MIU terkait kepercayaan: Patutkah ada dua jenis KTP?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia42720435>

Regulations

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN.1975/ No.12, TLN No. 3050.

Interview

Wawancara yang dilakukan bersama Suharti dan Merry Brilianty (Pamong Budaya Ahli Madya dan Pamong Budaya Ahli Muda) narasumber dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Wawancara dengan Endang Retno Lastani S.Sos., Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, pada 26 Juni 2024.